

PEMERINTAH KOTA JAMBI

KECAMATAN DANAU SIPIN



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



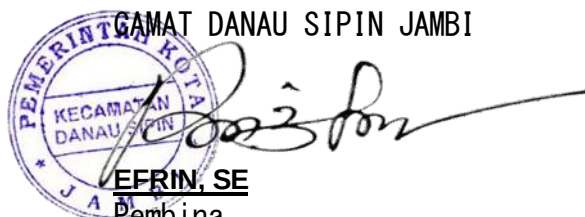
KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan Petunjuk, Taufik dan Hidayah-NYA, Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Sipin kota Jambi adalah penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029. Perencanaan Strategis yang disusun merupakan arah dan pedoman dalam pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Segala yang telah disusun dalam Renstra Tahun 2025–2029 ini akan ditindak lanjuti dengan Akuntabilitas Kinerja.

Kami menyadari, Rancangan Awal Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan adanya dokumen Rancangan Awal Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Pemerintah Kota Jambi maupun masyarakat. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima dengan hati terbuka sebagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga akan membawa manfaat dalam Pembangunan Daerah di Kota Jambi, Terima Kasih.

Jambi, Juli 2025


CAMAT DANAU SIPIN JAMBI
EFFRIN, SE
Pembina
Nip. 19711101 199001 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI.....	9
2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DANAU SIPIN.	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Danau Sipin.....	9
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Danau Sipin.....	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DANAU SIPIN	22
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.2.2.	Pene
ntuan Isu Isu Strategis	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
KECAMATAN DANAU SIPIN	27
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Sipin.....	27
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Danau Sipin..	28
3.3. Cascading Kinerja Kecamatan Danau Sipin.....	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Danau Sipin Daerah.....	32
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	53

BAB V	PENUTUP	58
-------	---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan....	15
Tabel 2.1.2.2Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon.....	15
Tabel 2.1.2.3Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.1.2.4Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Danau Sipin...	16
Tabel 2.1.3.1(T-C 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.....	19
Tabel 2.1.3.2 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi	21
Tabel 2.1.4. Jenis Pelayanan di Kecamatan Danau Sipin	22
Tabel 2.2.1. (T-B 35) Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	23
Tabel 3.1. (T-C 26) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Danau Sipin	27
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Danau Sipin ...	29
Tabel 3.3. Cascading Kecamatan Danau Sipin Jambi Kota Jambi	31
Tabel 4.1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Danau Sipin Tahun 2024.....	33
Tabel 4.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Danau Sipin Tahun 2025–2029	35
Tabel 4.1.3. (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi	38
Tabel 4.2.1. (T-C 28) Target Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029.....	53
Tabel 4.2.2. Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin Tahun 2025–2029	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada Diktum KEDUA huruf b menyatakan Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Kecamatan Danau Sipin merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Tahapan :

a. Persiapan Penyusunan

- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan

- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Dengan disusunnya RENSTRA Kecamatan, maka Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005–2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024–2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024–2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B di Kota Jambi.

21. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025–2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 adalah :

1. Menjamin Keselarasan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kecamatan Danau Sipin, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
2. Sebagai Pedoman bagi aparatur dilingkungan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
3. Sebagai Pedoman untuk pengukuran pencapaian Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang akan dituankan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENSTRA Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra, dimana latar belakang penyusunan Renstra perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada Diktum KEDUA huruf b menyatakan Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan Kegiatan serta indikator Kinerja perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada Bab sistematika penulisan dokumen Renstra, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Danau Sipin, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Kecamatan Danau Sipin.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Danau Sipin dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Danau Sipin berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Danau Sipin periode sebelumnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan organisasi perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan Bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Danau Sipin beserta faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2 Penentuan Isu Isu Strategis

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Danau Sipin Jambi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Danau Sipin, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Danau Sipin tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Sipin

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan

Danau Sipin, yang mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Pada Bab ini juga memuat Cascading Kinerja Kecamatan Danau Sipin, yang merupakan turunan indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Kota Jambi dimulai dari Eselon III sampai pada Staf.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Danau Sipin

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Danau Sipin dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, dimana pada bab ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran RPJMD Kota Jambi.

3.3. Cascading Kinerja Kecamatan Danau Sipin.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Danau Sipin.

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu anggaran Kecamatan Danau Sipin dalam mencapai tujuan dan sasaran Kinerja Tahun 2025–2029.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Danau Sipin Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang dilakukan telah berhasil dicapai atau tidak.

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Danau Sipin disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman perencanaan

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN DANAU SIPIN JAMBI KOTA JAMBI

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DANAU SIPIN

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Danau Sipin

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B di Kota Jambi. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Danau Sipin mempunyai fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Danau Sipin:

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, meliputi penataan pemerintahan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan, ketatausahaan dan tugas fungsional di kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian Pemerintahan kecamatan/kelurahan;
2. Penyelenggaraan batas kelurahan;
3. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan kecamatan;

4. Penyelenggaraan pembinaan tertib administrasi kependudukan dan pertanahan;
5. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat, kebersihan, lingkungan hidup, mental dan spiritual;
7. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan masyarakat;
8. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kecamatan.

Organisasi Kecamatan terdiri dari unsur :

- A. Camat
- B. Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Seksi - seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Tata Pemerintahan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Seksi Pelayanan Umum
- D. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi yang berkenaan dengan urusan umum.

Fungsinya :

- Penyusunan program kerja Kecamatan secara berjangka
- Perumusan kebijaksanaan teknis Kecamatan

- Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi Kecamatan

- Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi sesuai bidang tugasnya
- Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan
- Penyelenggaraan ketatausahaan, pengadministrasian kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- Pengkoordinasian pelayanan umum masyarakat di bidang administrasi
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi
- Pelaksanaan tata laksana kantor
- Penyelenggaraan arsip kecamatan
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kerja Camat
- Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang tugasnya.

2. **Seksi Pemerintahan**

mempunyai tugas pokok menghimpun rencana kerja Seksi Pemerintahan, menyusun program kerja pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, serta menyusun program kerja pembinaan pertanahan dan batas Kelurahan.

Fungsinya :

- Menyusun program kerja pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- Menyusunan program/kerja administrasi kependudukan dan informasi komunikasi, pembinaan pertanahan dan batas Kelurahan.

3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial**

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat pada bidang Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perekonomian, pembinaan

kelembagaan masyarakat dan adat, menyusun program kerja pembinaan lingkungan hidup dan kebersihan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum;
2. Melaksanakan pembinaan kesbangpolinmas;
3. Melaksanakan pengawasan trantib umum;
4. Membantu pengawasan tertib perizinan;
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp kecamatan;
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan;
7. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
8. Melaksanakan penertibaan dan penegakan perda dan produk hukum lainnya;
9. Melaksanakan penertibaan terhadap pkl, tuna wisma, tuna karya dan tuna susila dalam wilayah kecamatan;
10. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan;
11. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan Umum dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana kerja seksi Pelayanan Umum;
2. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
3. Memberikan Pelayanan Surat Keterangan;
4. Melaksanakan Legalisasi Surat Menyurat;

5. Memproses Pemberian Perizinan Pedagang Kaki Lima;

6. Memberikan Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan;
7. Menyiapkan dan Menyajikan data-data Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat;
11. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan;
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

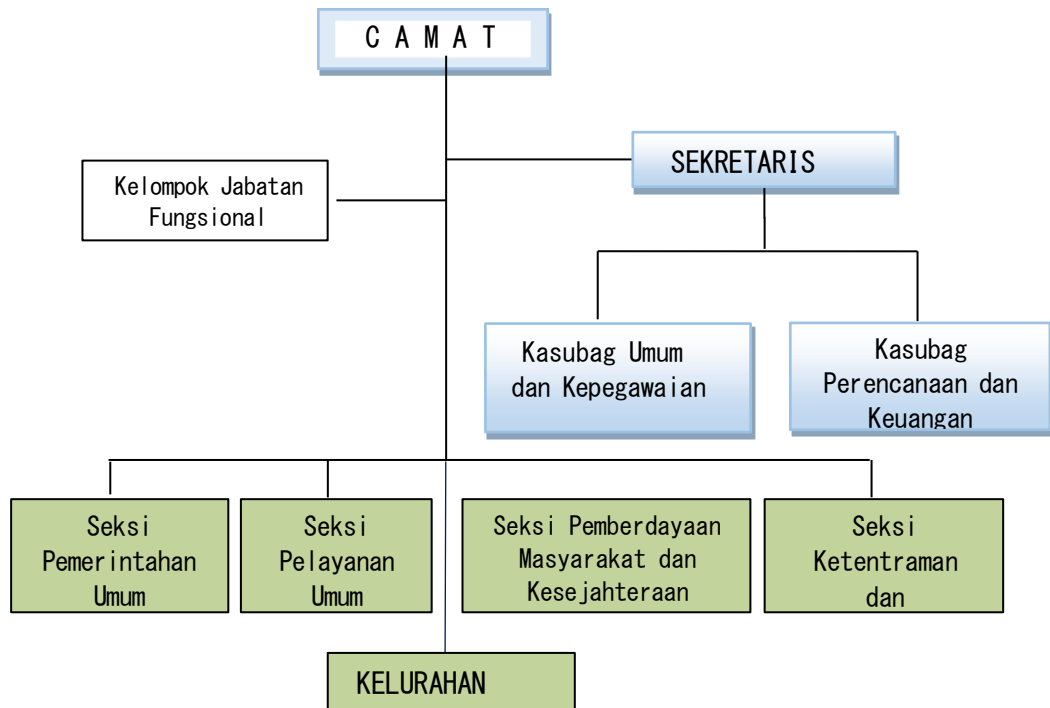
Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Struktur Organisasi Kecamatan Danau Sipin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 unsur organisasi kecamatan terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan;
3. Pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir.

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Danau Sipin



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Danau Sipin

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi didukung oleh Sumber daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	0
2	Pembina	IV/a	4
3	Penata Tk. I	III/d	17
4	Penata	III/c	7
5	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Tk. I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	0
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
10	Tenaga Kerja Kontrak	–	31
	Jumlah		70

Sumber : SOTK Kecamatan Danau Sipin 2024

Tabel 2.1.2.2
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	III. a	1
2.	III. b	1
3.	IV. a	10
4.	IV. b	17
5.	Staf	10
6.	Tenaga Kerja Kontrak	31
	Jumlah	70

Sumber : SOTK Kecamatan Danau Sipin 2024

Tabel 2.1.2.3
Jumlah Pegawai
berdasarkan tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
2	Sarjana (S1)	15	20	35
3	Sarjana Muda/D4/D3	2	1	3
4	SLTA/SMK/KPAA	19	8	27
	Jumlah			70

Sumber : SOTK Kecamatan Danau Sipin 2024

Pengelolaan Aset

A. Aset yang dikelola

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Danau Sipin, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.1.2.4
Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Danau Sipin

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Gedung Kantor Kelurahan	5	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	4	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kecamatan + Kelurahan)	21	Baik
6	Sound System (Kecamatan + Kelurahan)	7	Baik
7	Komputer PC (Kecamatan + Kelurahan)	46	Baik
8	Printer	43	Baik
9	Laptop	12	Baik
10	Rak Besi	1	Baik

11	Mesin Absen (Kecamatan + Kelurahan)	6	Baik
12	Filling Cabinet	14	Baik
13	Brangkas besar	1	Baik
14	Kursi Tunggu Pelayanan	7	Baik
15	TV	12	Baik
16	Kipas Angin	2	Baik
17	AC (Kecamatan + Kelurahan)	22	Baik
18	Papan Nama Instansi (Kecamatan + Kelurahan)	6	Baik
19	Meja Pelayanan	6	Baik
20	Papan Pengumuman	5	Baik
21	Kursi, Meja Tamu	8	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Sipin

Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja, maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program, kegiatan maupun sub kegiatan dapat terlaksana.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Danau Sipin memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Indikator ini merupakan perwujudan dari peran Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk Kecamatan Danau Sipin yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.

Capaian indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin bila dibandingkan dengan target pada Renstra Perubahan 2025–2029 sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Pencapaian Kinerja

yang telah mencapai angka

100% atau lebih. Pencapaian kinerja Kecamatan Danau Sipin dapat dilihat pada Tabel T-C 2.1.3.1 (**T-C 23**) berikut :

Tabel 2.1.3.1
Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	88	90	92	93	94	88, 86	90, 53	92, 99	94, 58	-	1, 00	1, 00	1, 01	1. 02	-
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-	72, 72	81, 81	99, 99	100	100	90, 90	100	100	100	-	1, 21	1, 22	1, 00	1, 00	-

Pada Indikator kinerja 1(satu) yaitu Indeks kepuasan Masyarakat didapatkan dengan cara pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana nilainya didapat dari hasil survey kepada masyarakat terkait dengan sembilan (9) unsur pelayanan yang terdiri dari: Persyaratan Layanan, Sistem dan Mekanisme serta Prosedur Layanan, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif Layanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan serta Saran dan Masukan, dan Sarana serta Prasarana Layanan. Sedangkan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Untuk Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, formulasi perhitungannya adalah dengan cara Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina Ditingkat Kecamatan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Danau Sipin Jambi Kota Jambi.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Danau Sipin selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel T-C

2.1.3.2. (**T-C 24**) sebagai berikut :

Tabel T-C 2.1.3.2.

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Operasi	11.480.229.073	11.059.544.368	10.891.273.03	12.137.796.790	11.959.924.000	10.874.261.856	10.265.591.185,76	10.315.946.471	10.812.501.133		0,94	0,92	0,94	0,89			
Belanja Modal	303.935.563	417.574.310	575.765.935	401.728.210		225.953.500	411.814.310	563.860.000	400.067.000		0,97	0,98	0,97	0,99			
Jumlah	11.784.164.636	11.477.118.678	11.467.038.967	12.539.525.000	11.959.924.000	11.100.215.356	10.677.405.495,76	10.879.806.471	11.212.568.133		0,92	0,93	0,94	0,89			

Anggaran Kecamatan Danau Sipin dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran karna pandemi covid-19. Walaupun masih pandemi covid-19 penyerapan masih di atas 90% yang artinya masih efektif dan efisien. Tahun 2023 terdapat penurunan hal ini disebabkan masih defisitnya anggaran pemerintah kota jambi sehingga mengangarkan berdasarkan skala prioritas. Pada tahun 2024 anggaran mengalami kenaikan, hal ini disebabkan penambahan Belanja Operasi Seperti Dana BKBK dan Dana Fiskal Kecamatan Danau Sipin, dan pada tahun 2025 mengalami Penurunan dikarenakan adanya efisiensi perangkat daerah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Danau Sipin adalah Masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan, Kelompok usaha/industri serta Kelurahan yang ada dilingkungan Kecamatan Danau Sipin.

Jenis Pelayanan yang ada di Kantor Camat Danau Sipin pada Tahun 2024 antara lain berupa Administrasi pelayanan surat surat Non Perizinan dan Administrasi Pelayanan surat-surat Perizinan. Pelayanan di Kantor Camat Danau Sipin berpedoman pada Peraturan yang telah ada antara lain PP 37 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

Jenis Pelayanan di Kecamatan Danau Sipin dapat disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1.4.
Jenis Pelayanan di Kecamatan Danau Sipin

No	PELAYANAN			KET
	JENIS	INDIKATOR KINERJA	WAKTU	
1	Rekomendasi SITU	Waktu Pelayanan	50 Menit	
2	Izin Penelitian Mahasiswa	Waktu Pelayanan	30 Menit	
3	SKTM	Waktu Pelayanan	30 Menit	
4	Surat Keterangan	Waktu Pelayanan	30 Menit	
5	Surat Waris	Waktu Pelayanan	30 Menit	
6	Izin Keramaian	Waktu Pelayanan	30 Menit	

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan capaian Kinerja Kecamatan Danau Sipin diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat sudah Baik, namun belum optimal. Kemudian untuk Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, walaupun belum mencapai target tetapi masih dalam kategori cukup baik

dan

pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat khususnya di Kelurahan masih terus ditingkatkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Danau Sipin, Pemetaan permasalahan disajikan pada tabel 2.2.1. (T-B 35) berikut :

Tabel 2.2.1
Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Uraian Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan kepada Masyarakat belum optimal	Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam proses Pelayanan kepada masyarakat.	Kurangnya pengetahuan Pengguna Layanan dalam Penggunaan Teknologi
2	Realisasi usulan musrenbang Kecamatan belum optimal	Usulan program prioritas masih ada yang belum terealisasi	Anggaran yang terbatas

2.2.2. Penentuan Isu Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas

pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tahun 2025–2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Jambi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi prangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berkelanjutan
Birokrasi Pemerintah Daerah yang berkelanjutan merupakan suatu Birokrasi dimana Resistensi terhadap perubahan birokrasi yang cepat sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin

kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan public paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan. Oleh karena itu, manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya

diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan

(*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DANAUSIPIN

Mengacu pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029 maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Danau Sipin selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 3.1 (T-C 26) sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tabel T-C 26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Danau Sipin

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				5	6	7	8	9
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)					
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 (A)	92 (A)	93 (A)	94 (A)	95 (A)
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan					
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%	96%	97%	98%	99%

Pada Indikator kinerja 1(satu) yaitu Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan dengan cara pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan PERMEN PAN-RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Sedangkan Indikator kinerja 2 (dua) yaitu Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan diperoleh dari rata-rata persentase persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina di Tk. Kecamatan ditambah persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina di kelurahan ditambah persentase pelaksanaan kampung bahagia.

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN DANAU SIPIN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Danau Sipin adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD Kota Jambi. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Danau Sipin menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Danau Sipin Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Danau Sipin selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Danau Sipin.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Danau Sipin mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Danau Sipin untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Jambi.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk pencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.2.**Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Danau Sipin**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	1.1 Peningkatan Kualitas dan Efisiensi pelayanan Publik berbasis TIK	- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelayanan - Meningkatkan sarana prasarana digital yang memadai untuk mendukung layanan publik berbasis elektronik. - Penyederhanaan prosedur pelayanan untuk mempercepat waktu penyelesaian.
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	- Meningkatkan penguatan lembaga dan Kelompok Usaha Lokal - Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan lembaga masyarakat.
		1.2 Pengembangan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan.	- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana Kecamatan dan Kelurahan

3.3. CASCADING KINERJA KECAMATAN DANAU SIPIN

Cascading kinerja Kecamatan Danau Sipin disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
CASCADING KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI

TUJUAN	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik										Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP)										Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan						
SASARAN	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik										Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat						
INDIKATOR SASARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan						
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			Persentase Permasalahan Trantibum Yang ditindaklanjuti		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	
KEGIATAN	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Administrasi Keuangan PD	Administrasi BMD pada PD	Administrasi Kepegawaian PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemberdayaan Kelurahan		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KECAMATAN DANAU SIPIN.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran kinerja Kecamatan Danau Sipin Periode Tahun 2025–2029.

Tahun 2024 Kecamatan Danau Sipin melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian sebagaimana Tabel 4.1.1. berikut :

Tabel 4.1.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Danau Sipin Tahun 2024

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
–	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
–	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
–	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
–	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
–	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
–	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
–	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
–	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
–	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi umum perangkat daerah
–	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
–	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
–	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
–	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
–	Pengadaan Mebel
–	Pengadaan Peralatan dan Mesin
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
–	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
–	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
–	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
–	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
–	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
–	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
–	Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
–	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
–	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
–	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
–	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
–	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
–	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
–	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
–	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
–	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau

Sipin Jambi Tahun 2025–2029 ini, maka program, kegiatan dan sub kegiatan

yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 4.1.2. sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Danau Sipin Tahun 2025-2029

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
–	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
–	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
–	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
–	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
–	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
–	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
–	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
–	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
–	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi umum perangkat daerah
–	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
–	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
–	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
–	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
–	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
–	Pengadaan Mebel
–	Pengadaan Peralatan dan Mesin
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
–	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
–	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
–	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
–	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
-	Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
-	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tabel 4.1.3.
Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%	6.800.913.211													Kecamatan Danau Sipin	Kota Jambi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Persentase Nilai Akip	79,92 nilai	79,92 nilai	20.302.685														
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7 Dokumen	18.513.785														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3 Dokumen	1.788.904														
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	5.599.032.494														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		46 Orang	5.105.251.650														
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan		3 Dokumen	25.006.910														

	tugas ASN																	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan PD		12 Dokumen	457.681.200														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD		2 laporan	11.092.734														
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	18.000.000														
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		12 Laporan	18.000.000														
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	100%	76.250.000														
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket	70.250.000														
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		2 Orang	6.000.000														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum		100%	271.038.215														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2 Paket	19.679.357														

'Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		3 Paket	109.365.650													
'Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	16.993.212													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		8 Laporan	125.000.000													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah		100%	401.728.210													
Pengadaan Mebel	Jumlah paket yang disediakan		278 Unit	138.181.930													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37 Unit	263.546.280													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	195.600.000													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 Laporan	6.000.000													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		7 Laporan	189.600.000													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	218.961.600													

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperihara dan di bayarkan pajak dan perizinan		100%	199.151.600													
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara		20 Unit	19.810.000													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Paket	16.420.767													
'PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		100%	826.496.335												Kecamatan Danau Sipin	Kota Jambi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	'Persentase Koordinasi yang di laksanakan oleh Kecamatan		89%	384.879.011													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		12 Dokumen	384.879.011													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan		10%	366.822.280													
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan		5 dokumen	366.822.280													

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelayanan yang Terakomodir		100%	74.795.044													Kecamatan Danau Sipin	Kota Jambi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		3 Dokumen	58.515.660														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan		9 Laporan	16.279.384														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	4.045.569.696													Kelurahan Se Kecamatan Danau Sipin	Kota Jambi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan		80%	4.045.569.696														
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sungai Putri	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		12 Lembaga	2.999.873														
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Murni	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		12 Lembaga	2.999.873														
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Legok	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		12 Lembaga	2.999.873														
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang		12 Lembaga	2.999.873														

forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Selamat	berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan																	
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Solok Sipin	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		12 Lembaga	2.999.873														
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Putri	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		5 Unit	180.000.000														
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Murni	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		10 Unit	133.633.298														
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Legok	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		7 Unit	190.499.994														
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selamat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		7 Unit	169.496.673														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Solok Sipin	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		15 Unit	179.000.000														
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai putri	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan		12 Pokmas/O rmas	595.348.535														
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Murni	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan		12 Pokmas/O rmas	475.808.949														
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Legok	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan		12 Pokmas/Or mas	819.520.654														
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selamat	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan		12 Pokmas/Or mas	628.093.286														

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Solok sipin	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan		12 Pokmas/Ormas	659.168.942													
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif		100%	351.795.167													
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Pembinaan Sistim Keamanan Lingkungan		80%	337.245.167													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		4 Laporan	337.245.167													
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada		100%	14.550.000													
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia		12 Laporan	14.550.000													
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	498.329.823													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah		80%	498.329.823													

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional		23 orang	17.250.000														
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		5 Dokumen	481.079.825														
				12.539.525.000														
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100%	7.154.783.015	100%	7.485.854.967	100%	8.971.244.300	100%	9.627.813.800	100%	10.342.665.100	100%	11.062.532.000	Kecamatan Danau Sipin	Kota Jambi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Persentase Nilai Akip				79,92 Nilai	17.547.326	BB	18.053.902	BB	19.910.000	BB	21.901.000	BB	24.091.100	BB	26.502.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				7 Dokumen	15.782.519	7 Dokumen	16.264.998	7 Dokumen	17.930.000	7 Dokumen	19.723.000	7 Dokumen	21.695.300	7 Dokumen	23.865.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3 Dokumen	1.764.807	3 Dokumen	1.788.904	3 Dokumen	1.980.000	3 Dokumen	2.178.000	3 Dokumen	2.395.800	3 Dokumen	2.637.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan				100%	6.418.908.409	100%	6.268.202.618	100%	7.042.384.300	100%	7.417.122.800	100%	7.812.865.000	100%	8.231.130.000		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				48 Orang	5.859.103.000	48 Orang	5.859.103.000	48 Orang	6.590.000.000	48 Orang	6.919.500.000	48 Orang	7.265.475.000	48 Orang	7.629.000.000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				3 Dokumen	13.848.484	3 Dokumen	13.848.484	3 Dokumen	17.600.000	3 Dokumen	19.360.000	3 Dokumen	21.300.000	3 Dokumen	23.430.000		
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Dokumen	536.598.400	12 Dokumen	384.158.400	12 Dokumen	422.574.300	12 Dokumen	464.831.800	12 Dokumen	511.315.000	12 Dokumen	562.447.000		
Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD				2 Laporan	9.358.521	2 Laporan	11.092.734	2 Laporan	12.210.000	2 Laporan	13.431.000	2 Laporan	14.775.000	2 Laporan	16.253.000		
Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah				100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	22.800.000	100%	27.600.000	100%	32.400.000	100%	37.200.000		
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	22.800.000	12 Laporan	27.600.000	12 Laporan	32.400.000	12 Laporan	37.200.000		
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian				100%	66.000.000	100%	84.000.000	100%	90.750.000	100%	97.500.000	100%	104.250.000	100%	111.000.000		
Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapan				1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.750.000	1 Paket	61.500.000	1 Paket	62.250.000	1 Paket	63.000.000		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				1 Orang	6.000.000	4 Orang	24.000.000	5 Orang	30.000.000	6 Orang	36.000.000	7 Orang	42.000.000	8 Orang	48.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum				100%	218.428.831	100%	279.000.000	100%	311.000.000	100%	343.000.000	100%	375.000.000	100%	407.000.000		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 Paket	18.397.800	2 Paket	17.000.000	2 Paket	18.000.000	2 Paket	19.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	30.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				3 Paket	84.565.179	3 Paket	95.000.000	3 Paket	100.000.000	3 Paket	105.000.000	3 Paket	110.000.000	3 Paket	115.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Paket	15.465.852	1 Paket	17.000.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	19.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	21.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	175.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	225.000.000	8 Laporan	250.000.000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah						100%	300.000.000	100%	880.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.350.000.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	100.000.000	2 Unit	250.000.000	3 Unit	380.000.000	4 Unit	420.000.000	5 Unit	480.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						25 Unit	100.000.000	30 Unit	280.000.000	35 Unit	350.000.000	40 Unit	400.000.000	45 Unit	450.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						15 Unit	100.000.000	20 Unit	350.000.000	25 Unit	300.000.000	35 Unit	380.000.000	35 Unit	420.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	195.600.000	100%	195.600.000	100%	214.400.000	100%	235.690.000	100%	259.059.000	100%	284.700.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				7 Laporan	189.600.000	7 Laporan	189.600.000	7 Laporan	207.900.000	7 Laporan	228.690.000	7 Laporan	251.559.000	7 Laporan	276.700.000		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik				100%	220.298.447	100%	322.998.447	100%	390.000.000	100%	455.000.000	100%	535.000.000	100%	615.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperihara dan di bayarkan pajak dan perizinan				19 Unit	199.998.447	19 Unit	199.998.447	20 Unit	215.000.000	21 Unit	225.000.000	22 Unit	250.000.000	23 Unit	275.000.000		
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara				28 Unit	20.300.000	32 Unit	23.000.000	34 Unit	25.000.000	35 Unit	30.000.000	36 Unit	35.000.000	38 Unit	40.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Fedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlahgedung kantor dan bangunan lainnya yang Dielihara/Direhabilitasi						1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100%	776.878.223	100%	514.028.378	100%	576.976.796	100%	628.317.335	100%	684.673.721	100%	746.132.346		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang di laksanakan oleh Kecamatan				89%	397.478.612	89%	121.088.378	90%	127.142.796	91%	133.499.935	92%	140.174.931	93%	147.183.677		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				12 Dokumen	397.478.612	12 Dokumen	121.088.378	12 Dokumen	127.142.796	12 Dokumen	133.499.935	12 Dokumen	140.174.931	12 Dokumen	147.183.677		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan				9%	322.204.299	9%	350.000.000	8%	385.000.000	7%	423.500.000	6%	465.850.000	5%	512.435.000		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan				5 Dokumen	322.204.299	5 Dokumen	350.000.000	5 Dokumen	385.000.000	5 Dokumen	423.500.000	5 Dokumen	465.850.000	5 Dokumen	512.435.000		

	kepada masyarakat di kecamatan																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelayanan yang Terakomodir				100%	57.195.312	100%	42.940.000	100%	64.834.000	100%	71.317.400	100%	78.648.790	100%	86.513.669		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	40.921.500	3 Dokumen	26.440.000	3 Dokumen	46.684.000	3 Dokumen	51.352.400	3 Dokumen	56.487.640	3 Dokumen	62.136.404		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan				9 Dokumen	16.273.812	9 Dokumen	16.500.000	9 Dokumen	18.150.000	9 Dokumen	19.965.000	9 Dokumen	22.161.150	9 Dokumen	24.377.265		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%		100%	3.707.996.659	100%	4.578.296.317	100%	5.235.525.947	100%	5.933.379.539	100%	6.675.916.392		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan				84%		84%	3.707.996.659	86%	4.578.296.317	88%	5.235.525.947	90%	5.933.379.539	92%	6.675.916.392		
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sungai Putri	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				12 Lembaga Masyarakat	2.999.821	12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.200.000	12 Lembaga Masyarakat	3.400.000	12 Lembaga Masyarakat	3.600.000	12 Lembaga Masyarakat	3.800.000		
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Murni	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.200.000	12 Lembaga Masyarakat	3.400.000	12 Lembaga Masyarakat	3.600.000	12 Lembaga Masyarakat	3.800.000		
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Solok Sipin	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.200.000	12 Lembaga Masyarakat	3.400.000	12 Lembaga Masyarakat	3.600.000	12 Lembaga Masyarakat	3.800.000		

Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Selamat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.200.000	12 Lembaga Masyarakat	3.400.000	12 Lembaga Masyarakat	3.600.000	12 Lembaga Masyarakat	3.800.000		
Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Legok	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				12 Lembaga Masyarakat	2.999.799	12 Lembaga Masyarakat	3.000.000	12 Lembaga Masyarakat	3.200.000	12 Lembaga Masyarakat	3.400.000	12 Lembaga Masyarakat	3.600.000	12 Lembaga Masyarakat	3.800.000		
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Putri	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun								2 Unit	100.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000		
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Murni	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun								2 Unit	100.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000		
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Solok Sipin	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun								2 Unit	100.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000		
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selamat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun								2 Unit	100.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Legok	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun								2 Unit	100.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	250.000.000		
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai putri	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan				12 Pokmas / Ormas	747.409.979	12 Pokmas / Ormas	747.409.979	12 Pokmas / Ormas	822.150.976	12 Pokmas / Ormas	904.366.073	12 Pokmas / Ormas	994.803.680	12 Pokmas / Ormas	1.094.282.948		
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Murni	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan				12 Pokmas / Ormas	635.302.603	12 Pokmas / Ormas	635.302.603	12 Pokmas / Ormas	698.832.863	12 Pokmas / Ormas	768.716.149	12 Pokmas / Ormas	845.587.763	12 Pokmas / Ormas	930.146.539		
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Solok Sipin	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan				12 Pokmas / Ormas	723.933.759	12 Pokmas / Ormas	723.933.759	12 Pokmas / Ormas	796.327.134	12 Pokmas / Ormas	875.959.847	12 Pokmas / Ormas	963.555.831	12 Pokmas / Ormas	1.059.911.414		

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selamat	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan				12 Pokmas / Ormas	695.318.576	12 Pokmas / Ormas	695.318.576	12 Pokmas / Ormas	764.850.433	12 Pokmas / Ormas	841.335.476	12 Pokmas / Ormas	925.469.023	12 Pokmas / Ormas	1.018.015.925		
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Legok	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan				12 Pokmas / Ormas	891.031.733	12 Pokmas / Ormas	891.031.733	12 Pokmas / Ormas	980.134.911	12 Pokmas / Ormas	1.078.148.402	12 Pokmas / Ormas	1.185.963.242	12 Pokmas / Ormas	1.304.559.566		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif				100%	342.508.133	100%	345.120.000	100%	379.632.000	100%	417.595.200	100%	459.354.720	100%	505.290.192		
'Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase peningkatan sistim keamanan lingkungan sistim				35%	328.008.133	40%	330.120.000	60%	363.132.000	80%	399.445.200	90%	439.389.720	100%	483.328.692		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan				4 Laporan	328.008.133	4 Laporan	330.120.000	4 Laporan	363.132.000	4 Laporan	399.445.200	4 Laporan	439.389.720	4 Laporan	483.328.692		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Fasilitas panganan pelanggaran perda dan perkada				100%	14.500.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau kepolisian negara republik indonsia				12 Laporan	14.500.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	18.150.000	12 Laporan	19.965.000	12 Laporan	21.961.500		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100%	374.084.353	100%	365.000.000	100%	401.500.000	100%	441.650.000	100%	485.815.000	100%	534.396.500		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Persentase terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah				82%	374.084.353	84%	365.000.000	86%	401.500.000	88%	441.650.000	88%	485.815.000	90%	534.396.500		

Daerah																		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional				23 Orang	13.125.000	23 Orang	15.000.000	23 Orang	16.500.000	23 Orang	18.150.000	23 Orang	19.965.000	23 Orang	21.961.500		
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal				5 Dokumen	360.959.355	5 Dokumen	350.000.000	5 Dokumen	385.000.000	5 Dokumen	423.500.000	5 Dokumen	465.850.000	5 Dokumen	512.435.000		
TOTAL						12.356.250.000		12.418.000.000		14.907.649.413		16.350.902.282		17.905.888.080		19.524.267.430		

4.2. Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai target indikator kinerja dan formulasi penghitungan indikator kinerja dari Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Untuk lebih jelasnya target indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Danau Sipin dapat dilihat pada Tabel 4.2.1. (T-C 28) sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.
Tabel T-C 28

Target Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029

No		INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
I		TUJUAN					
	I. 1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)					
II		SASARAN					
	II. 1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92 (A)	93 (A)	94 (A)	95 (A)
	II. 2.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%	96%	97%	98%	99%
1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kecamatan	91	92 (A)	93 (A)	94 (A)	95 (A)
	1. 1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan					
		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan	89%	89%	90%	91%	92%
	1. 1. 1	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
		Keg. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan					
		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unita Kerja PD di Kecamatan	9%	8%	8%	7%	6%
	1.2.1	Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
	1.3.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat					
		Persentase Pelayanan yang terakomodir	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha					
		Jumlah Dokumen Non Perizinan yang dilaksanakan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
	1.3.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					
		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap
2		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Persentase Permasalahan Trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Persentase Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan	40%	60%	80%	90%	100%
	2.1.1	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.					

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
	2.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2.1.	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1.	Kegiatan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
		Persentase terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	82%	84%	86%	88%	88%
	3.1.1	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan · Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional	23 Org	23 Org	23 Org	23 Org	23 Org
	3.1.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Semua · Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
	4. 1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Putri					
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dibina Kelurahan Sungai Putri	82%	84%	86%	88%	90%
	4. 1. 1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang kel.	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
	4. 1. 2	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	–	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
	4. 1. 3	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		Jumlah Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas
	4. 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Murni					
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dibina Kelurahan Murni	82%	84%	86%	88%	90%
	4. 2. 1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang kel.	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
	4. 2. 2	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	–	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
	4. 2. 3	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		Jumlah Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas
	4. 3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Solok Sipin					
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dibina Kelurahan Solok Sipin	82%	84%	86%	88%	90%

4.3.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbangkel.	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
4.3.2	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	–	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
4.3.3	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Jumlah Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas
4.4.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Selamat					
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dibina Kelurahan Selamat	82%	84%	86%	88%	90%
4.4.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbangkel.	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
4.4.2	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	–	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
4.4.3	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Jumlah Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas
4.5.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Selamat					
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dibina Kelurahan Selamat	82%	84%	86%	88%	90%
4.5.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbangkel.	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga

4. 5. 2	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	–	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
4. 5. 3	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Jumlah Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Danau Sipin diperoleh melalui formulasi perhitungan target Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. berikut :

Tabel 4.2.2.
Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Rumus
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PERMEN PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99
2.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Rata-rata dari % lembaga kemasyarakatan yang dibina di Tk. Kecamatan + % lembaga kemasyarakatan yang dibina dikelurahan + % pelaksanaan kampung bahagia

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kota Jambi. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi merupakan pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Danau Sipin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam penetapan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi melalui Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi setiap tahunnya, selanjutnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Danau Sipin akan disampaikan pertanggungjawaban dari pelaksanaan perencanaan kinerja tersebut.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025–2029 dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jambi, Juli

2025 Camat Danau

Sipin,



EFRIN, SE

Pembina

Nip. 19711101 199011 1 001